

## APBD-P INHU DISAHKAN RP1,8 TRILIUN



Sumber gambar:

<https://www.metrورياu.com/berita/19816--apbd-p-inhu-disahkan-rp18-triliun.html?id=19816--apbd-p-inhu-disahkan-rp18-triliun>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhu sahkan Peraturan Daerah APBD Perubahan tahun 2024, Sabtu (24/8) malam. APBD Perubahan Inhu disetujui Rp1,8 triliun lebih. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Inhu, Rosman Yatim. Dihadiri 27 anggota DPRD Inhu dari 40 anggota dewan.

Rapat paripurna yang dilaksanakan di ruang rapat lantai II Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Inhu. Hadir Wakil Bupati, Drs H Junaidi Rachmat MSi, Forkopimda, Pj Sekda Inhu, Sekwan, Staf Ahli, Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Camat Se Inhu, perwakilan BUMN dan BUMD serta undangan lainnya.

Anggota Banggar DPRD Inhu, Sugeng Riono SP dalam laporannya menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, salah satu fungsi DPRD adalah fungsi anggaran. Diwujudkan dalam pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang APBD atau perubahan APBD yang diajukan oleh kepala daerah.

Banggar DPRD Inhu telah melaksanakan pembahasan Ranperda tentang APBD Perubahan 2024 yang telah diajukan Bupati Inhu pada tanggal 16 Agustus 2024 lalu. Rincian Perubahan APBD Inhu 2024 dengan jumlah pendapatan senilai Rp1.646.922.428.137, jumlah belanja pembiayaan senilai Rp203.484.102.179. Total APBD-Perubahan tahun anggaran 2024 Kabupaten Inhu senilai Rp 1.850.406.530.316.

Sementara itu, Wakil Bupati (Wabup) Inhu, Junaidi Rachmat menyampaikan apresiasi serta penghargaan kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten

Indragiri Hulu atas kebersamaan yang terus terpelihara. "Terimakasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu, yang telah menyetujui perubahan APBD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2024," ucap Wabup. Dikatakannya, DPRD selaku unsur penyelenggara pemerintah memiliki komitmen dan kesungguhan yang tinggi terhadap kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Hasil persetujuan akan dituangkan dalam peraturan daerah Kabupaten Inhu tahun 2024 dan akan disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi serta mendapat persetujuan. Kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah, Wabup menyampaikan sebagai pengelola keuangan daerah agar dapat mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber-sumber pendapatan, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

**Sumber berita:**

1. <https://www.metroriau.com/berita/19816--apbd-p-inhu-disahkan-rp18-triliun.html?id=19816--apbd-p-inhu-disahkan-rp18-triliun>, "APBD-P Inhu Disahkan Rp1,8 Triliun", 25 Agustus 2024; dan
2. <https://riaupos.jawapos.com/indagiri-hulu/2255018115/apbd-p-inhu-disahkan-rp18-triliun>, "APBD-P Inhu Disahkan Rp1,8 Triliun", 26 Agustus 2024.

**Catatan:**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) dan disusun sesuai Pedoman Penyusunan APBD. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan antara lain:

- a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.

Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. Laporan realisasi semester pertama

APBD Tahun Anggaran 2024 menjadi dasar dalam proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa, yaitu keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan. Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS tersebut dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan. Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA SKPD yang kemudian disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan. Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.